



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pejanggik Nomor 12 Telp./Fax (0370) 622373 Mataram

PENGUMUMAN NOMOR : 800.1.2.2 / 2996 / BKD / 2024

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat membuka kesempatan kepada Seluruh Tenaga Honorer Kategori (THK) II, Tenaga Non ASN database BKN, Tenaga Non ASN non database BKN dan Lulusan PPG Lingkup Pemerintah Provinsi NTB yang berminat menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 391 Tahun 2024 Tentang Persyaratan wajib Tambahan Dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024.
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian tidak terpisah dari pengumuman ini secara umum. Seluruh pelamar wajib membaca dan memedomani ketentuan dalam aturan dimaksud.

II. FORMASI JABATAN

Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024 untuk memenuhi kebutuhan antara lain Jabatan Fungsional Guru, Jabatan Fungsional Kesehatan, Jabatan Fungsional Teknis Lainnya serta Jabatan Pelaksana, dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah alokasi formasi sebanyak 360 formasi, yang terdiri dari :

1. Jabatan Fungsional Guru sejumlah 130 formasi;
2. Jabatan Fungsional Kesehatan sejumlah 55 formasi; dan
3. Jabatan Fungsional Teknis Lainnya dan Jabatan Pelaksana sejumlah 175 formasi.

Rincian formasi jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I pengumuman ini.

III. KRITERIA PELAMAR BERDASARKAN JENIS FORMASI :

A. Jabatan Fungsional Guru.

Pelamar pada pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Guru, meliputi :

1. Pelamar Prioritas : adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya;
2. Guru Eks THK-II : adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data eks THK-II pada BKN dan aktif mengajar di instansi pemerintah;
3. Guru Non-ASN : adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data tenaga Non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah atau guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus menerus di instansi tempat mengajar;
4. Lulusan PPG : adalah Lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Pelamar Prioritas, Guru Eks THK-II, dan Guru Non-ASN hanya dapat melamar pada Instansi Pemerintah tempat mengajar saat mendaftar.

B. Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan.

Pelamar pada pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan, meliputi :

1. Eks THK-II, adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data Eks THK-II pada BKN dan aktif bekerja pada Instansi Pemerintah;
2. Tenaga Non-ASN, yang terdiri atas :
 - a. pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data tenaga Non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada Instansi Pemerintah;
 - b. pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.

Pelamar sebagaimana dimaksud hanya dapat melamar pada Instansi Pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.

C. Jabatan Fungsional Teknis Lainnya dan Jabatan Pelaksana

Pelamar pada pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Teknis Lainnya dan Jabatan Pelaksana, meliputi :

1. Eks THK-II, adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data Eks THK-II pada BKN dan aktif bekerja pada Instansi Pemerintah;
2. tenaga Non-ASN, yang terdiri atas :
 - a. pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data tenaga Non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada Instansi Pemerintah;
 - b. pegawai yang aktif bekerja pada Instansi Pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.

Pelamar sebagaimana dimaksud hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar

IV. PERSYARATAN

- A. Persyaratan Umum
1. Warga Negara Indonesia;
 2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum BUP pada Jabatan yang akan dilamar pada saat melamar;
 3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar dibuktikan dengan ijazah asli, tanskrip nilai/daftar nilai asli; Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan dan konversi nilai IPK oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
 9. Memiliki pengalaman kerja yang relevan minimal 2 tahun untuk pelamar jabatan pelaksana, fungsional jenjang pemula, terampil dan ahli pertama, atau 3 tahun untuk Jabatan fungsional jenjang ahli muda yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja;
 10. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
 11. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan
 12. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

B. Persyaratan Khusus

1. Jabatan Fungsional Guru
 - a. Pelamar Prioritas P1 (Tahun 2023) yang tidak mendapatkan formasi pada rekrutmen sebelumnya dan/atau tidak dalam status aktif mengajar menurut data Dapodik, wajib mengunggah Surat ijin dari Instansi Pemerintah tujuan pendaftaran.
 - b. Pelamar Prioritas P1 (Tahun 2023) yang status aktif mengajar di Dapodik pada sekolah swasta wajib mengunggah dokumen berupa Surat Ijin Melamar seleksi PPPK dari Ketua yayasan/lembaga tempat bekerja saat ini;
 - c. Pelamar yang status aktif mengajar di Dapodik pada Sekolah Negeri wajib mengunggah dokumen berupa Surat Keterangan Mengajar dari Kepala Sekolah tempat bekerja saat ini;
 - d. Pelamar PPPK JF Guru wajib memiliki kualifikasi pendidikan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidikan dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024;
2. Jabatan Fungsional Kesehatan.
 - a. Surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, dengan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar, paling singkat 2 (dua) s.d. 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan yang dilamar (Lihat ketentuan pada Kepmen PANRB No. 349 Tahun 2024);
 - b. Surat keterangan aktif bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Bagi pelamar yang TIDAK terdaftar dalam database non-ASN BKN, masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus;
 - c. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku bagi jabatannya tertentu sesuai dengan KEPMENPAN-RB Nomor 322 Tahun 2024;

- d. Kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama :
1) Diploma IV Analis Kesehatan; 2) Diploma IV / Sarjana Terapan Analis Kesehatan;
3) Diploma IV / Sarjana Terapan peminatan / jurusan/program studi / konsentrasi Teknologi Laboratorium Medis; 4) Diploma IV / Sarjana Terapan peminatan / jurusan/program studi / konsentrasi Teknologi Laboratorium Medis. **WAJIB** untuk mencantumkan syarat STR;
- e. Kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil :
1) Diploma III Analis Kesehatan; 2) Diploma III Teknologi Laboratorium Medik; 3) Diploma III Teknologi Laboratorium Medis. **WAJIB** untuk mencantumkan syarat STR;
- f. Bagi Jabatan Fungsional Dokter dengan Sub Jabatan Dokter Spesialis dan Dokter Sub Spesialis, pengalaman / masa kerja dapat dihitung sejak menempuh pendidikan dokter spesialis dan/ atau dokter sub spesialis;
- g. Pelamar PPPK jabatan fungsional Kesehatan wajib memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024, kecuali jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan sesuai poin 2.d dan 2.e.
3. Jabatan Fungsional Teknis Lainnya dan Pelaksana.
- Surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, dengan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar, paling singkat 2 (dua) s.d. 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan yang dilamar (Lihat ketentuan pada Kepmen PANRB No. 349 Tahun 2024)
 - Surat keterangan aktif bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Bagi pelamar yang TIDAK terdaftar dalam database Non-ASN BKN, masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus;
 - Mengunggah persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk jabatan fungsional tertentu, sesuai dengan KEPMENPAN-RB Nomor 391 tahun 2024;
 - Pelamar pada Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan Ahli Pertama, melampirkan persyaratan wajib tambahan yaitu surat keterangan tidak buta warna yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Pemerintah;
 - Pelamar pada Jabatan Fungsional Analis Kebakaran dan Pemadam Kebakaran, melampirkan persyaratan wajib tambahan antara lain :
 - surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas;
 - surat keterangan bukan penyandang disabilitas dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas.
4. Persyaratan Khusus Tambahan Pelamar Disabilitas
- Penyandang disabilitas selain memenuhi persyaratan diatas, harus memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut :
 - Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
 - Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas/tugas sesuai dengan jabatan yang akan dilamar.
 - Pelamar seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024 yang berstatus sebagai penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Penyandang Disabilitas Rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Fungsional Guru bahasa indonesia atau Jabatan Fungsional Guru Bahasa Inggris;
 - Penyandang Disabilitas Daksa tidak dapat melamar kebutuhan PPPK pada Jabatan Fungsional Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, Dan Kesehatan; dan
 - Penyandang Disabilitas Netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Fungsional Guru Seni Budaya Keterampilan.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar membuat akun pada Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSASN) melalui tautan <https://sscasn.bkn.go.id>, dengan memasukkan data diri dalam KTP berupa NIK, Nama, Tempat Tanggal Lahir dan Nomor Kartu Keluarga lalu mengikuti formulir petunjuk yang diberikan. Pelamar yang sudah memiliki akun pada SSASN tahun anggaran sebelumnya tetap harus membuat akun pada SSASN tahun anggaran 2024. Pelamar yang sebelumnya sudah memiliki akun SSASN Tahun Anggaran 2024 dapat menggunakan akunnya kembali hanya jika belum melakukan pelamaran pada Seleksi ASN Tahun 2024.
2. Setelah membuat akun, pelamar login menggunakan NIK dan Password yang sudah ditentukan.
3. Pelamar mengisi biodata terdiri dari data diri, nama dan tanggal lahir sesuai ijazah yang dimiliki, derajat disabilitas dan link video disabilitas (jika merupakan seorang disabilitas) serta data diri lainnya.
4. Pelamar memilih jenis pengadaan yang akan dilamar, apakah akan melamar PPPK Teknis (Fungsional dan Pelaksana), PPPK Kesehatan atau PPPK Guru.
5. Bagi pelamar yang masuk kategori THK-II, wajib mencantumkan Nomor Peserta Ujian THK-II Tahun 2013 setelah memilih jenis pengadaan. **Pelamar THK-II yang tidak memasukkan nomornya pada tahap ini tidak akan masuk kategori THK-II dan tidak akan mendapatkan prioritas khusus dalam pengolahan.**
6. Pelamar memilih kualifikasi pendidikan, jabatan dan unit kerja sesuai dengan yang ingin dilamar.
7. Pelamar mengisi data terkait pendidikan antara lain: nama kampus, prodi, nilai IPK, dan akreditasi.
8. Pelamar memilih lokasi ujian. Pastikan lokasi ujian dipilih memang yang sesuai domisili. **Pelamar tidak bisa mengubah lokasi ujian setelah melamar.**
9. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan, pastikan dokumen terunggah dan terbaca dengan baik sesuai dengan format dan ukuran yang ditentukan SSASN dan pastikan klik Lihat setelah unggah dokumen, dokumen persyaratan berikut :
 - a. Pasfoto formal terbaru berlatar belakang warna merah;
 - b. Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan dari Dukcapil / Bukti Identitas Kependudukan lainnya;
 - c. Surat Pernyataan lima poin yang sudah ditandatangani dan dibubuh materai (format sesuai lampiran III pengumuman ini);
 - d. Surat Lamaran sesuai dengan persyaratan instansi dan sudah ditandatangani dan dibubuh materai (format sesuai lampiran II pengumuman ini);
 - e. Ijazah asli, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - f. Transkrip/Daftar Nilai asli, bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri wajib melampirkan Konversi Nilai IPK dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - g. (Khusus PPPK JF Kesehatan, JF Teknis dan Pelaksana) Surat keterangan bekerja yang ditandatangani pimpinan unit kerja, dengan pengalaman di bidang kerja paling singkat 2 (dua) tahun untuk pelamar jabatan pelaksana / fungsional terampil / pertama atau 3 (tiga) tahun untuk pelamar jabatan fungsional muda (format sesuai lampiran IV pengumuman ini).
 - h. (Khusus PPPK JF Kesehatan, JF Teknis dan Pelaksana) Surat keterangan aktif bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar yang ditandatangani pimpinan unit kerja (format sesuai lampiran V pengumuman ini). **Bagi pelamar yang TIDAK terdaftar database Non ASN BKN, harus mencantumkan masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus;**
 - i. (Khusus PPPK JF Kesehatan) STR bagi tenaga kesehatan tertentu;
 - j. (Khusus PPPK JF Guru)
 - 1) Bagi pelamar Kategori Prioritas P1 Guru Tahun 2021 yang tidak mendapatkan formasi pada rekrutmen sebelumnya dan/atau tidak dalam status aktif mengajar menurut data Dapodik, wajib mengunggah Surat Izin dari Instansi Pemerintah tujuan pendaftaran;
 - 2) Bagi pelamar prioritas yang statusnya aktif mengajar di Dapodik pada Sekolah Swasta, wajib mengunggah surat izin melamar PPPK dari Ketua Yayasan/Lembaga;
 - 3) Bagi pelamar yang statusnya aktif mengajar di Dapodik pada Sekolah Negeri, wajib mengunggah surat keterangan Kepala Sekolah tempat bekerja saat ini;
 - k. (Khusus Disabilitas) Surat keterangan menyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh dari rumah sakit pemerintah / puskesmas dan menyampaikan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas/tugas sesuai dengan jabatan yang akan dilamar;
 - l. (Khusus PPPK JF Teknis dan Pelaksana) Untuk penambahan nilai seleksi kompetensi teknis, pelamar pada jabatan fungsional dapat mengunggah scan dokumen berupa sertifikat kompetensi yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan Dan Sertifikat Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional.

10. Pelamar dihadapkan pada layar resume, pastikan data yang diisi sudah sesuai dan pastikan seluruh dokumen unggahan sudah sesuai. Jika sudah, pelamar dapat melakukan "AKHIRI PENDAFTARAN". **SETELAH AKHIRI PENDAFTARAN, SELURUH DATA DAN DOKUMEN YANG TERUNGGAH TIDAK BISA DIUBAH KEMBALI.**

VI. JADWAL SELEKSI

Berdasarkan Surat Plt. Kepala BKN Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024, terdapat dua periode gelombang pendaftaran berdasarkan kategori peserta sebagai berikut:

- Jadwal I** : diperuntukkan bagi pelamar prioritas (prioritas Guru), eks THK-II, Tenaga Non ASN yang terdaftar di pangkalan data (database) BKN.

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	30 September s.d. 19 Oktober 2024
2	Pendaftaran Seleksi	1 s.d. 20 Oktober 2024
3	Seleksi Administrasi	1 s.d. 29 Oktober 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 Oktober s.d. 1 November 2024
5	Masa Sanggah	2 s.d. 4 November 2024
6	Jawab Sanggah	2 s.d. 6 November 2024
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	5 s.d. 11 November 2024
8	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	26 November s.d. 1 Desember 2024
9	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	2 s.d. 19 Desember 2024
10	Pengumuman Hasil Kelulusan	24 s.d. 31 Desember 2024
11	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 31 Januari 2025
12	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 28 Februari 2025

- Jadwal II** : diperuntukkan bagi pelamar Pelamar Tenaga non ASN yang Aktif Bekerja di Instansi Pemerintah (Termasuk Lulusan PPG untuk Formasi Guru di Instansi Daerah).

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	1 s.d. 30 November 2024
2	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d. 31 Desember 2024
3	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d. 3 Februari 2025
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 s.d. 18 Februari 2025
5	Masa Sanggah	19 s.d. 21 Februari 2025
6	Jawab Sanggah	20 s.d. 27 Februari 2025
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	22 s.d. 28 Februari 2025
8	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 s.d. 16 April 2025
9	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d. 16 Mei 2025
10	Pengumuman Hasil Kelulusan	22 s.d. 31 Mei 2025
11	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 30 Juni 2025
12	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 31 Juli 2025

Pelamar yang tidak masuk kategori pada pembagian Jadwal I tidak dapat melanjutkan proses pemilihan formasi jika melakukan pendaftaran pada Jadwal I. Pelamar hanya melamar pada jadwal yang sudah ditentukan.

VII. LAYANAN BANTUAN INFORMASI (HELP DESK)

Panitia Seleksi Daerah membentuk unit layanan bantuan informasi (Helpdesk) melalui :

- Kantor BKD Provinsi NTB, Jalan Pejanggik No. 14 Mataram, Telp. 0370-7507500 pada hari kerja mulai pukul 08.00 s.d 16.00 WITA;
- Portal BKD Provinsi NTB <https://bkd.ntbprov.go.id/rekrutmen>;
- Media sosial Instagram : @bkdprovinisntb;
- WhatsApp Panitia Seleksi, **089517761617**

VIII. MATERAI PADA DOKUMEN

1. Berkenaan dengan proses pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2024 diperkenankan bagi calon pendaftar untuk menggunakan meterai elektronik (e-meterai) maupun meterai konvensional (tempel) pada dokumen unggahan Surat Lamaran maupun Surat Pernyataan.
2. Calon pendaftar agar tidak menggunakan meterai palsu ataupun meterai yang sudah digunakan, karena hal tersebut dapat mengakibatkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahap Seleksi Administrasi.

IX. LAIN-LAIN

1. Seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** dalam bentuk apapun;
2. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
3. Pelamar harus membaca dengan cermat setiap poin pada pengumuman ini, kesalahan yang diakibatkan kelalaian pelamar pada saat pendaftaran menjadi tanggung jawab pelamar;
4. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggahan yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur/tidak lulus dan merupakan kelalaian peserta;
5. Jika peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta secara otomatis dianggap gugur;
6. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir, namun terdapat kekeliruan pada formasi jabatan, kualifikasi pendidikan dan unit kerja penempatan yang tidak sesuai dengan nomenklatur jabatan dan lain-lain yang menyebabkan Nomor Induk PPPK tidak dapat diproses, maka Panitia Seleksi dapat membatalkan kelulusan yang bersangkutan;
7. Dalam hal peserta seleksi dikemudian hari terbukti ditemukan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan pada saat proses seleksi dan sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi serta mendapatkan persetujuan nomor induk PPPK, maka akan dibatalkan status kepegawaiannya;
8. Dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, yang diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Menteri.
9. Hal-hal yang belum dimuat dalam pengumuman ini akan diinformasikan lebih lanjut.
10. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal, 30 September 2024
SEKRETARIS DAERAH,

H. LALU GIT ARIADI



LAMPIRAN II
PENGUMUMAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB
NOMOR : 800.1.2.2 / 2996 / BKD / 2024
TENTANG
SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

....., Oktober 2024

Perihal : Pendaftaran Seleksi PPPK
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Formasi Tahun Anggaran 2024

Kepada
Yth. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat
c.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
di -
Mataram

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan *)
NIK KTP :
Jabatan yang dilamar :
Kualifikasi Pendidikan :
Unit Kerja Penempatan :
Agama :
Alamat sesuai KTP :
Alamat Email yang aktif :
No. HP :

Dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan dokumen yang diunggah pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan 5 Poin, yang sudah ditandatangani dan dibubuh materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
2. Surat Lamaran, yang sudah ditandatangani dan dibubuh materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), yang ditujukan kepada Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat c.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
3. Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan dari Dukcapil / Bukti Identitas Kependudukan lainnya;
4. Ijazah asli dan Transkrip Nilai asli, sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar;
5. Pas foto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah;
6. Surat Tanda Registrasi (STR), yang masih berlaku **);
7. Scan Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas Pemerintah yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya ***);
8. Surat Keterangan Pengalaman Kerja ****);
9. Surat Keterangan Aktif Bekerja ****);

Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia untuk membatalkan keikutsertaan / kelulusan saya pada seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024.

Atas perhatian disampaikan terima kasih.

Meterai
Rp. 10.000

Hormat saya,

ttd

(Nama Lengkap)

Catatan :

- *) Pilih salah Satu;
- **) Hanya berlaku bagi Pelamar PPPK JF Kesehatan;
- ***) Hanya berlaku bagi Pelamar Penyandang Disabilitas;
- ****) Hanya berlaku bagi Pelamar PPPK JF Kesehatan dan PPPK JF Teknis dan Pelaksana.
Format surat lamaran 1 halaman (ditulis tangan sendiri/diketik dengan menggunakan komputer)

LAMPIRAN III

PENGUMUMAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB

NOMOR : 800.1.2.2 / 2996 / BKD / 2024

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN

PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :

Tempat dan tanggal lahir :

Agama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....,

Yang membuat pernyataan,

Meterai
Rp. 10.000

.....

LAMPIRAN IV

PENGUMUMAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB

NOMOR : 800.1.2.2 / 2996 / BKD / 2024

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN

PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

NOMOR :

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Unit Kerja :

telah melaksanakan tugas sebagai

..... selama tahun bulan, terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal dan berkinerja baik dan memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2024

Nama Jabatan,

Stempel
Unit Kerja

(TTD)

(Nama Pejabat)
NIP.

LAMPIRAN V

PENGUMUMAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB

NOMOR : 800.1.2.2 / / 2996 / BKD / 2024

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN

PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

KOP SURAT

**SURAT KETERANGAN AKTIF BEKERJA
PADA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI NTB**
NOMOR :

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Unit Kerja :

telah melaksanakan tugas secara aktif dan secara terus menerus selama..... tahun..... bulan, sesuai keputusan pengangkatan pertama sebagai Tenaga Non ASN oleh*) Nomor tanggal terhitung mulai tanggal sampai saat mendaftar dan berkinerja baik.

Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atas data dimaksud, kami bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas akibat yang ditimbulkan oleh kesalahan tersebut.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2024

Nama Jabatan,

Stempel
Unit Kerja

(TTD)

(Nama Pejabat)

NIP.

Keterangan :

*) Nama Jabatan yang mengangkat dan menandatangani SK.

KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN
SURAT IZIN MENGIKUTI SELEKSI PPPK JF GURU TAHUN 2024

NOMOR:

Yth.

Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan ASN PPPK Guru

Prov./Kab./Kota

di tempat

Sehubungan dengan prasyarat surat izin dari kepala instansi pada pelaksanaan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diatur pada Diktum keenam KepmenPAN-RB Nomor: 348 Tahun 2024, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Prov./Kab./Kota

memberikan izin kepada:

Nama :

NIK :

Kategori Prioritas :

- Pelamar Prioritas yang sudah tidak terdata aktif di Dapodik
- Pelamar Prioritas mutasi dari luar instansi

Instansi sebelumnya : Prov./Kab./Kota
(jika pelamar mutasi dari luar instansi)

untuk mengikuti seleksi ASN PPPK Guru sebagai pelamar prioritas tahun 2024 dan akan mematuhi segala ketentuan yang berlaku.

Demikian surat izin ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat...., Tanggal.....

Kepala Dinas Pendidikan
Prov./Kab./Kota

[TTD & Cap Dinas]

Nama.....

NIP:

KOP SURAT YAYASAN

SURAT IZIN MENGIKUTI SELEKSI PPPK JF GURU TAHUN 2024

NOMOR:.....

Yth.

Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan ASN PPPK Guru

Prov./Kab./Kota

di tempat

Sehubungan dengan prasyarat surat izin dari ketua Yayasan pada pelaksanaan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diatur pada Diktum keenam KepmenPAN-RB Nomor: 348 Tahun 2024, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Ketua Yayasan

Nama Yayasan :

memberikan izin kepada:

Nama :

NIK :

Nama Sekolah :

untuk mengikuti seleksi ASN PPPK JF Guru tahun 2024 sebagai pelamar prioritas dan akan mematuhi segala ketentuan yang berlaku. Apabila yang bersangkutan dinyatakan lulus seleksi, siap dilepaskan dan ditempatkan pada sekolah negeri.

Demikian surat izin ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat...., Tanggal.....

Ketua Yayasan

[TTD & Cap Yayasan]

Nama.....

KOP SURAT SEKOLAH

SURAT KETERANGAN AKTIF MENGAJAR

NOMOR:.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : Kepala Sekolah

Unit Kerja : TKN/SDN/SMPN/SMAN/SMKN/SLBN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama :

NIK :

Jabatan : Guru.....

Unit Kerja : TKN/SDN/SMPN/SMAN/SMKN/SLBN

Instansi : Dinas Pendidikan Prov./Kab./Kota.....

Yang bersangkutan benar terdaftar dan mengajar sebagai Guru pada unit kerja dimaksud.

Demikian Surat keterangan aktif mengajar ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat...., Tanggal.....

Kepala Sekolah

[TTD & Cap Dinas]

Nama.....

NIP:

LAMPIRAN I
PENGUMUMAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB
NOMOR : 800.1.2.2 / 2996 / BKD / 2024
TENTANG
SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	FORMASI JABATAN	JUMLAH FORMASI	DAPAT DILAMAR DISABILITAS	UNIT KERJA
A	TENAGA GURU	130		
1	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA BUDHA	1	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA HINDU	1	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	4	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	1	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGROBISNIS PERIKANAN	1	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGROBISNIS TANAMAN	1	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGROBISNIS TERNAK	1	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGROTEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN	1	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9	GURU AHLI PERTAMA - GURU AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	2	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
10	GURU AHLI PERTAMA - GURU ANTROPOLOGI	1	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
11	GURU AHLI PERTAMA - GURU BAHASA ARAB	1	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
12	GURU AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	2	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
13	GURU AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	1	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
14	GURU AHLI PERTAMA - GURU BAHASA JEPANG	1	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
15	GURU AHLI PERTAMA - GURU BAHASA JERMAN	1	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
16	GURU AHLI PERTAMA - GURU BAHASA PERANCIS	1	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
17	GURU AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	3	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
18	GURU AHLI PERTAMA - GURU BIOLOGI	1	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
19	GURU AHLI PERTAMA - GURU BROADCASTING DAN PERFILMAN	1	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
20	GURU AHLI PERTAMA - GURU BUSANA	3	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
21	GURU AHLI PERTAMA - GURU DESAIN DAN PRODUKSI KRIYA	1	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
22	GURU AHLI PERTAMA - GURU DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
23	GURU AHLI PERTAMA - GURU DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN	1	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
24	GURU AHLI PERTAMA - GURU EKONOMI	1	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
25	GURU AHLI PERTAMA - GURU FISIKA	1	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
26	GURU AHLI PERTAMA - GURU GEOGRAFI	2	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
27	GURU AHLI PERTAMA - GURU IPS	1	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
28	GURU AHLI PERTAMA - GURU KECANTIKAN DAN SPA	4	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
29	GURU AHLI PERTAMA - GURU KEHUTANAN	1	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
30	GURU AHLI PERTAMA - GURU KIMIA	1	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
31	GURU AHLI PERTAMA - GURU KULINER	8	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
32	GURU AHLI PERTAMA - GURU MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	1	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
33	GURU AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	2	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
34	GURU AHLI PERTAMA - GURU NAUTIKA KAPAL NIAGA	3	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
35	GURU AHLI PERTAMA - GURU NAUTIKA KAPAL PENANGKAPAN IKAN	3	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
36	GURU AHLI PERTAMA - GURU PEMASARAN	1	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	FORMASI JABATAN	JUMLAH FORMASI	DAPAT DILAMAR DISABILITAS	UNIT KERJA
37	GURU AHLI PERTAMA - GURU PENDIDIKAN KHUSUS	15	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
38	GURU AHLI PERTAMA - GURU PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM	2	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
39	GURU AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
40	GURU AHLI PERTAMA - GURU PERHOTELAN	9	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
41	GURU AHLI PERTAMA - GURU PPKN	3	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
42	GURU AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRASAHAAN	1	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
43	GURU AHLI PERTAMA - GURU SEJARAH	4	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
44	GURU AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	4	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
45	GURU AHLI PERTAMA - GURU SENI PERTUNJUKAN	1	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
46	GURU AHLI PERTAMA - GURU SENI RUPA	1	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
47	GURU AHLI PERTAMA - GURU SOSIOLOGI	2	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
48	GURU AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK ELEKTRONIKA	2	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
49	GURU AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK ENERGI TERBARUKAN	1	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
50	GURU AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK GEOLOGI PERTAMBANGAN	2	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
51	GURU AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK GEOSPASIAL	1	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
52	GURU AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
53	GURU AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK KETENAGALISTRIKAN	1	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
54	GURU AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK MESIN	1	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
55	GURU AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK OTOMOTIF	1	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
56	GURU AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK PENGELESAAN DAN FABRIKASI LOGAM	1	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
57	GURU AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK PERAWATAN GEDUNG	1	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
58	GURU AHLI PERTAMA - GURU TEKNIKA KAPAL NIAGA	2	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
59	GURU AHLI PERTAMA - GURU TEKNIKA KAPAL PENANGKAPAN IKAN	2	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
60	GURU AHLI PERTAMA - GURU TIK	1	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
61	GURU AHLI PERTAMA - GURU USAHA LAYANAN PARIWISATA	8	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KETERANGAN :

Kualifikasi Pendidikan untuk Jabatan Guru Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024

NO	FORMASI JABATAN	JUMLAH FORMASI	DAPAT DILAMAR DISABILITAS	UNIT KERJA
B	TENAGA KESEHATAN	55		
1	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	2	Ya	DINAS KESEHATAN
2	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	Ya	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
3	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	Tidak	RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
4	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	Ya	DINAS KESEHATAN
5	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	Ya	RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
6	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	Ya	DINAS KESEHATAN UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PENGUJIAN DAN KALIBRASI
7	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	2	Ya	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
8	ASISTEN PENATA ANESTESI TERAMPIL	1	Tidak	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
9	BIDAN AHLI PERTAMA	1	Tidak	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
10	BIDAN TERAMPIL	1	Tidak	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
11	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANAK	1	Tidak	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
12	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	2	Tidak	DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT MANDALIKA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
13	DOKTER GIGI AHLI MUDA - DOKTER GIGI SPESIALIS ORTODONSI	1	Tidak	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
14	FISIOTERAPIS AHLI PERTAMA	1	Tidak	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
15	PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI PERTAMA	1	Tidak	DINAS KESEHATAN
16	PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA	1	Tidak	DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT MATA NUSA TENGGARA BARAT
17	PERAWAT AHLI PERTAMA	2	Tidak	RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
18	PERAWAT AHLI PERTAMA	2	Tidak	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
19	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	Tidak	DINAS KESEHATAN UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PENGUJIAN DAN KALIBRASI
20	PERAWAT AHLI PERTAMA	3	Tidak	RUMAH SAKIT H. L. MANAMBAI ABDULKADIR
21	PERAWAT TERAMPIL	1	Tidak	DINAS KESEHATAN UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PENGUJIAN DAN KALIBRASI
22	PERAWAT TERAMPIL	1	Tidak	DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT MANDALIKA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
23	PERAWAT TERAMPIL	2	Tidak	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
24	PERAWAT TERAMPIL	2	Tidak	RUMAH SAKIT H. L. MANAMBAI ABDULKADIR
25	PERAWAT TERAMPIL	2	Tidak	DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT MATA NUSA TENGGARA BARAT
26	PERAWAT TERAMPIL	2	Tidak	RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
27	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	Tidak	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
28	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	Tidak	DINAS KESEHATAN UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PENGUJIAN DAN KALIBRASI
29	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	Tidak	RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
30	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	Tidak	DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT MATA NUSA TENGGARA BARAT
31	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	Tidak	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
32	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	2	Tidak	DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT MANDALIKA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
33	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	2	Tidak	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
34	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	Tidak	DINAS KESEHATAN UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PENGUJIAN DAN KALIBRASI
35	RADIOGRAFER AHLI PERTAMA	1	Tidak	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
36	RADIOGRAFER TERAMPIL	1	Tidak	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
37	TEKNISI TRANSFUSI DARAH TERAMPIL	1	Tidak	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
38	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	Tidak	DINAS KESEHATAN
39	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU TERAMPIL	1	Tidak	DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT MATA NUSA TENGGARA BARAT
40	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU TERAMPIL	2	Tidak	DINAS KESEHATAN
41	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	Tidak	DINAS KESEHATAN

KETERANGAN :

Kualifikasi Pendidikan untuk Jabatan Kesehatan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;

NO	FORMASI JABATAN	JUMLAH FORMASI	PENDIDIKAN	DAPAT DILAMAR DISABILITAS	UNIT KERJA
C	TENAGA TEKNIS LAINYA	175			
1	ANALIS AKUAKULTUR AHLI PERTAMA	1	D-IV ILMU PERIKANAN - D-IV SOSIAL EKONOMI PERIKANAN - D-IV ANALIS KIMIA - D-IV BIOLOGI - D-IV AKUAKULTUR - D-IV BUDIDAYA PERAIRAN - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - D-IV BUDIDAYA PERIKANAN - D-IV LINGKUNGAN - D-IV AGROBISNIS PERIKANAN - S-1 LINGKUNGAN - S-1 PERIKANAN BUDIDAYA - S-1 SUMBER DAYA AKUATIK	Ya	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	1	S-1 HUKUM	Ya	DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	1	S-1 HUKUM	Ya	DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT MANDALIKA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
4	ANALIS KEBAKARAN AHLI PERTAMA	1	S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 TEKNIK KIMIA - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 TEKNIK KESELAMATAN - S-1 TEKNIK KESELAMATAN KEBAKARAN	Tidak	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
5	ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN AHLI PERTAMA	1	D-IV KELAUTAN - D-IV PERIKANAN - S-1 KELAUTAN - S-1 PERIKANAN	Tidak	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
6	ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	1	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 DESAIN PRODUK - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	Tidak	DINAS PERDAGANGAN
7	KONSELOR ADIKSI AHLI PERTAMA	1	S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING - S-1 PSIKOLOGI - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT - S-1 SOSIOLOGI	Tidak	RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
8	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	6	SLTA SEDERAJAT	Ya	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
9	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	1	SLTA SEDERAJAT	Ya	DINAS KESEHATAN UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PENGUJIAN DAN KALIBRASI

NO	FORMASI JABATAN	JUMLAH FORMASI	PENDIDIKAN	DAPAT DILAMAR DISABILITAS	UNIT KERJA
10	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	1	SLTA SEDERAJAT	Ya	SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
11	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	1	SLTA SEDERAJAT	Ya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
12	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	3	SLTA SEDERAJAT	Ya	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
13	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	3	SLTA SEDERAJAT	Ya	SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BIRO UMUM
14	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	2	SLTA SEDERAJAT	Ya	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
15	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	1	SLTA KEJURUAN MULTIMEDIA	Ya	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
16	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	2	SLTA SEDERAJAT	Tidak	DINAS SOSIAL
17	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	1	SLTA SEDERAJAT	Ya	DINAS KESEHATAN
18	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	1	SLTA SEDERAJAT	Ya	DINAS PARIWISATA
19	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	7	SLTA SEDERAJAT	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
20	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	1	SLTA SEDERAJAT	Ya	DINAS PERINDUSTRIAN
21	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	1	SLTA SEDERAJAT	Ya	RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
22	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	1	SLTA SEDERAJAT	Ya	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
23	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	1	SLTA SEDERAJAT	Ya	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
24	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	4	SLTA SEDERAJAT	Ya	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
25	PARAMEDIK VETERINER PEMULA	1	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BIDANG KESEHATAN HEWAN	Tidak	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
26	PARAMEDIK VETERINER TERAMPIL	1	D-III PARAMEDIK VETERINER - D-III TEKNISI MEDIS VETERINER - D-III KESEHATAN TERNAK - D-III KESEHATAN HEWAN - D-III HYGIENE PANGAN - D-III TEKNIK REPRODUKSI SATWA	Tidak	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
27	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	1	D-IV PEKERJAAN SOSIAL - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	Tidak	RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
28	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	1	D-IV PEKERJAAN SOSIAL - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	Tidak	DINAS SOSIAL
29	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	7	SLTA/SMA SEDERAJAT	Tidak	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
30	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA	1	D-IV PLANLOGI - D-IV GEOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV MANAJEMEN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG - D-IV JASA KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK SIPIL	Tidak	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
31	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	2	D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANLOGI - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV DESAIN INTERIOR - D-IV JASA KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 PLANLOGI	Tidak	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	FORMASI JABATAN	JUMLAH FORMASI	PENDIDIKAN	DAPAT DILAMAR DISABILITAS	UNIT KERJA
32	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	1	D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV JASA KONSTRUKSI - D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 PLANOLOGI	Tidak	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
33	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	1	D-IV MANAJEMEN - D-IV ILMU EKONOMI - D-IV ADMINISTRASI NEGARA - D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV JASA KONSTRUKSI - D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN - S-1 HUKUM - S-1 PLANOLOGI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	Tidak	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
34	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	1	D-IV SEMUA JURUSAN - S-1 SEMUA JURUSAN	Ya	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
35	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	1	D-IV SEMUA JURUSAN - S-1 SEMUA JURUSAN	Ya	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
36	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	1	D-IV SEMUA JURUSAN - S-1 SEMUA JURUSAN	Ya	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
37	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	10	D-IV SEMUA JURUSAN - S-1 SEMUA JURUSAN	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
38	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	1	D-IV SEMUA JURUSAN - S-1 SEMUA JURUSAN	Tidak	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
39	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	1	D-IV SEMUA JURUSAN - S-1 SEMUA JURUSAN	Tidak	DINAS PERINDUSTRIAN
40	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	2	D-IV SEMUA JURUSAN - S-1 SEMUA JURUSAN	Ya	SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BIRO UMUM
41	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	1	D-IV SEMUA JURUSAN - S-1 SEMUA JURUSAN	Ya	DINAS PERDAGANGAN
42	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	1	D-IV SEMUA JURUSAN - S-1 SEMUA JURUSAN	Ya	SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO HUKUM
43	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	2	D-IV SEMUA JURUSAN - S-1 SEMUA JURUSAN	Ya	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
44	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	2	D-IV SEMUA JURUSAN - S-1 SEMUA JURUSAN	Ya	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
45	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	1	D-IV SEMUA JURUSAN - S-1 SEMUA JURUSAN	Ya	DINAS KESEHATAN
46	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	1	D-IV KESEHATAN	Ya	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	FORMASI JABATAN	JUMLAH FORMASI	PENDIDIKAN	DAPAT DILAMAR DISABILITAS	UNIT KERJA
47	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	1	D-IV SEMUA JURUSAN - S-1 SEMUA JURUSAN	Tidak	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
48	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	1	D-IV SEMUA JURUSAN - S-1 SEMUA JURUSAN	Ya	DINAS PERHUBUNGAN
49	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	1	D-IV SEMUA JURUSAN - S-1 SEMUA JURUSAN	Ya	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
50	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	1	D-IV SEMUA JURUSAN - S-1 SEMUA JURUSAN	Ya	RUMAH SAKIT H. L. MANAMBAI ABDULKADIR
51	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	1	D-IV SEMUA JURUSAN - S-1 SEMUA JURUSAN	Ya	INSPEKTORAT
52	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	1	D-IV SEMUA JURUSAN - S-1 SEMUA JURUSAN	Ya	SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
53	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	1	D-IV SEMUA JURUSAN - S-1 SEMUA JURUSAN	Ya	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
54	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	3	D-IV SEMUA JURUSAN - S-1 SEMUA JURUSAN	Ya	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
55	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	1	D-IV SEMUA JURUSAN - S-1 SEMUA JURUSAN	Ya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
56	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	1	D-IV GEOGRAFI - D-IV TEKNIK GEODESI - D-IV PLANOGI - D-IV TEKNIK GEOMATIKA - D-IV PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PLANOGI	Tidak	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
57	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	SLTA SEDERAJAT	Ya	SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
58	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	SLTA SEDERAJAT	Ya	DINAS KETAHANAN PANGAN SEKRETARIAT DINAS KETAHANAN PANGAN SUB BAGIAN UMUM
59	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	SLTA SEDERAJAT	Ya	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
60	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	SLTA SEDERAJAT	Ya	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
61	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	2	SLTA SEDERAJAT	Ya	SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BIRO UMUM
62	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	SLTA SEDERAJAT	Ya	SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO HUKUM
63	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	SLTA SEDERAJAT	Ya	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
64	PENGAWAS KOPERASI AHLI PERTAMA	1	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	Tidak	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	FORMASI JABATAN	JUMLAH FORMASI	PENDIDIKAN	DAPAT DILAMAR DISABILITAS	UNIT KERJA
65	PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	1	S-1 BISNIS - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 LOGISTIK - S-1 ILMU INFORMASI - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 HUKUM - S-1 SOSIOLOGI - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	Tidak	DINAS PERDAGANGAN
66	PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR AHLI PERTAMA	1	D-IV GEOGRAFI - D-IV BIOLOGI - D-IV AKUAKULTUR - D-IV ANTROPOLOGI - D-IV TEKNIK - D-IV PERIKANAN - D-IV LINGKUNGAN - D-IV ILMU KELAUTAN - D-IV EKONOMI SUMBERDAYA KELAUTAN - S-1 PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 ILMU KELAUTAN - S-1 LINGKUNGAN	Tidak	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
67	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	1	D-III SEMUA JURUSAN	Ya	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
68	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	1	D-III SEMUA JURUSAN	Tidak	SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
69	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	1	D-III KESEHATAN	Ya	RUMAH SAKIT H. L. MANAMBAI ABDULKADIR
70	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	1	D-III SEMUA JURUSAN	Ya	DINAS PARIWISATA
71	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	1	D-III SEMUA JURUSAN	Ya	DINAS KESEHATAN UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PENGUJIAN DAN KALIBRASI
72	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	1	D-III SEMUA JURUSAN	Ya	DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
73	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	1	D-III SEMUA JURUSAN	Ya	INSPEKTORAT
74	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	2	D-III SEMUA JURUSAN	Ya	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
75	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	1	D-III SEMUA JURUSAN	Ya	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
76	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	5	D-III SEMUA JURUSAN	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
77	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	1	D-III SEMUA JURUSAN	Ya	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
78	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	3	D-III SEMUA JURUSAN	Ya	SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BIRO UMUM
79	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	1	D-III SEMUA JURUSAN	Ya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
80	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	3	D-III SEMUA JURUSAN	Ya	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
81	PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP AHLI PERTAMA	1	D-IV TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN - D-IV PENYULUH PERIKANAN - D-IV PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 ILMU KELAUTAN - S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN - S-1 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN - S-1 ILMU PERIKANAN	Tidak	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
82	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	1	SD/SEDERAJAT	Ya	RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA

NO	FORMASI JABATAN	JUMLAH FORMASI	PENDIDIKAN	DAPAT DILAMAR DISABILITAS	UNIT KERJA
83	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	1	SD/SEDERAJAT	Ya	DINAS SOSIAL
84	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	3	SLTP/SMP SEDERAJAT	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
85	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	2	SLTP/SMP SEDERAJAT	Tidak	SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BIRO UMUM
86	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	2	SD/SEDERAJAT	Ya	SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BIRO UMUM
87	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	1	SD/SEDERAJAT	Ya	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
88	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	1	SD/SEDERAJAT	Ya	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
89	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	1	SLTP/SMP SEDERAJAT	Ya	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
90	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	1	SD/SEDERAJAT	Ya	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
91	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	1	SD/SEDERAJAT	Ya	DINAS PARIWISATA
92	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	1	SLTP/SMP SEDERAJAT	Ya	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
93	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	1	SLTP/SMP SEDERAJAT	Ya	DINAS SOSIAL
94	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	2	SD/SEDERAJAT	Ya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
95	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	S-1 SANITASI LINGKUNGAN - S-1 ILMU LINGKUNGAN - S-1 ILMU HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA LAHAN - S-1 PETERNAKAN - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 HORTIKULTURA - S-1 PERKEBUNAN - S-1 KIMIA - S-1 FISIKA - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT - S-1 BIOLOGI - S-1 GEOGRAFI - S-1 GEOLOGI - S-1 PENGELOLaan SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN - S-1 BUDIDAYA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN - S-1 ILMU KEDOKTERAN HEWAN - S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN	Tidak	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
96	PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN AHLI PERTAMA	1	S-1 PROTEKSI TANAMAN - S-1 AGRONOMI - S-1 HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN - S-1 BIOLOGI - S-1 AGROEKOTEKNOLOGI (MINAT PERLINDUNGAN TANAMAN / HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) - S-1 AGROTEKNOLOGI (MINAT PERLINDUNGAN TANAMAN / HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) - S-1 PERLINDUNGAN TANAMAN	Tidak	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

NO	FORMASI JABATAN	JUMLAH FORMASI	PENDIDIKAN	DAPAT DILAMAR DISABILITAS	UNIT KERJA
97	PENYULUH KEHUTANAN AHLI PERTAMA	1	S-1 ILMU BIOLOGI - S-1 KEHUTANAN - S-1 ILMU KEHUTANAN - S-1 ILMU KELAUTAN - S-1 AGRONOMI - S-1 AGROBISNIS - S-1 MANAJEMEN HUTAN - S-1 BIOLOGI - S-1 ILMU PERTANIAN - S-1 EKONOMI PANGAN DAN PERTANIAN - S-1 PERTANIAN BERKELANJUTAN - S-1 ILMU PANGAN	Tidak	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
98	PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	1	S-1 KIMIA - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 BIOLOGI - S-1 FISIOLOGI	Tidak	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
99	PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	1	D-IV PEKERJAAN SOSIAL - D-IV LAYANAN PUBLIK - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	Tidak	DINAS SOSIAL
100	PERENCANA AHLI PERTAMA	1	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 AGROBISNIS - S-1 ADMINISTRASI - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	Ya	DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT MANDALIKA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
101	PERENCANA AHLI PERTAMA	1	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	Ya	DINAS PERDAGANGAN
102	PERENCANA AHLI PERTAMA	1	D-IV AKUNTANSI - D-IV ANALISIS KEUANGAN - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 EKONOMI - S-1 PETERNAKAN - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI - S-1 ILMU PERTANIAN	Ya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
103	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	1	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	Ya	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
104	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	4	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER	Ya	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

NO	FORMASI JABATAN	JUMLAH FORMASI	PENDIDIKAN	DAPAT DILAMAR DISABILITAS	UNIT KERJA
105	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	1	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	Ya	DINAS PERDAGANGAN
106	PRANATA TRANTIBUM	7	SLTA/SMA SEDERAJAT	Tidak	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
107	SURVEYOR PEMETAAN AHLI PERTAMA	1	D-IV TEKNOLOGI SURVEI PEMETAAN DASAR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK GEOMATIKA	Tidak	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
108	SURVEYOR PEMETAAN AHLI PERTAMA	2	D-IV PERTANAHAN - D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN - D-IV TEKNOLOGI SURVEI PEMETAAN DASAR - S-1 TEKNIK GEODESI - S-1 KEHUTANAN - S-1 GEOGRAFI - S-1 TEKNIK GEOFISIKA	Tidak	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
109	SURVEYOR PEMETAAN TERAMPIL	1	D-III SURVEI DAN PEMETAAN - D-III TEKNIK GEOMATIKA - D-III PENGELOLAAN HUTAN - D-III PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS	Tidak	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KETERANGAN :

Persyaratan wajib dan Tambahan bagi Jabatan Teknis sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 391 Tahun 2024 Tentang Persyaratan wajib Tambahan Dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal, 30 September 2024

SEKRETARIS DAERAH,

H. LALU GIT ARIADI

